



**Warta No. 100
Mei 2010**

- Hal 2 Editorial Standarisasi
- Hal 3 Kaji Pembentukan Perusahaan Pengelola APBS
- Hal 5 CAFTA PERLU DICERMATI (Oleh : Iwan Sabatini)
- Hal 8 Konsultasi Pajak :
Ekspor JKP: Berlaku Untuk Semua Jasa ?
- Hal 10 Garuda Buka Rute Hongkong-Surabaya,
Malaysia Airlines Alami Kenaikan Load Factor
- Hal 12 Kebijakan Double Tax Dikeluhkan Pengusaha di Jatim dan Ekspor MAMIN Naik 10%
- Hal 15 GAFEKSI PKH Juanda Outbond
- Hal 16 Dialog Anggota DPW GAFEKSI/INFA JATIM

Editorial : Standarisasi

Kesepakatan perdagangan dilingkungan Asean dan China sudah berjalan memasuki kuartal ke-2 di tahun 2010. Sudah mulai bermunculan berbagai keluhan, keresahan dan keputusan yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha. Khususnya di sektor riil.

Sektor riil yang akan banyak terpukul dengan diberlakukannya C-AFTA ini, karena hampir tidak ada cara atau alat yang dapat membendung semua arus perdagangan yang masuk ke Indonesia. Arus barang yang masuk tersebut sangat signifikan dalam harga dan kuantitas. Namun dari segi kualitas masih dapat dipertanyakan kelayakannya untuk diperdagangkan di pasar domestik.

Dari sisi kualitas, standarisasi kualitas barang yang diperdagangkan di pasar domestik sudah punya patokan baku, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan memakai tolok ukur SNI tujuannya adalah, melindungi konsumen dari modus perdagangan dengan cara pengelabuan harga murah tapi diikuti pula dengan kualitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan masih banyak hal lainnya yang bertujuan melindungi konsumen domestik dari upaya yang akan merugikan konsumen itu sendiri.

Apakah pemegang otoritas memiliki ketegasan dalam menerapkan ketentuan SNI bagi setiap barang apapun yang beredar di pasar domestik? Baik produk dalam negeri sekalipun, apalagi produk impor. Apabila pemegang otoritas menerapkan ketentuan SNI hanya terbatas pada produk lokal, maka produk impor akan mudah masuk tanpa persyaratan SNI akhirnya akan mematikan produk lokal.

Karena yang beredar saat ini adalah produk impor yang murah dengan kualitas yang rendah dan usia pemakaian yang pendek pula. Dengan kata lain pasar domestik sebenarnya adalah tempat membuang sampah barang impor yang tidak bermutu dan konsumen terpesona (boleh juga disebut tertipu) dengan harga murah.

Apakah negara, dalam hal ini pemerintah sebagai pelaksana negara, tidak melakukan upaya melindungi warga negaranya dari serbuan barang-barang impor yang tidak bermutu dengan berlindung dibalik harga murah serta menjadikan wilayahnya sebagai tempat jual-beli sampah karena kualitas barangnya cepat jadi sampah.

Tidak akan menyalahi aturan WTO (World Trade Organization) tentang prinsip-prinsip perdagangan bebas, karena dimasing-masing negara pasti memiliki persyaratan yang ketat bukan dimaksudkan melarang secara terselubung barang impor masuk ke negaranya. Melainkan adalah melindungi warga negaranya terhadap barang-barang yang tidak bermutu dan membahayakan baik bagi warganya maupun ekosistem yang ada disekitarnya, jika terlalu cepat menjadi sampah.

Jadi tidak alasan bagi setiap upaya untuk melindungi warga negara, dalam hal ini sebagai konsumen, menjadi hal yang mengkhawatirkan akan melanggar ketentuan dari kesepakatan perdagangan bebas. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, maka adalah menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.

Negara tidak akan dipersalahkan oleh warga negaranya dan pelaku usaha lokal, bila upaya menerapkan SNI akan mampu memberikan jaminan terhadap kesehatan warga dan ekosistem lingkungan sekitarnya, apalagi mampu menjaga keberlangsungan usaha yang mampu menahan lajunya pengangguran. Lebih luar biasa lagi kalau negara mampu mendorong, menopang bahkan membantu meningkatkan laju ekspor dengan memangkas berbagai kendala yang ada di lapangan yang menyebabkan nilai komoditas ekspor kita kalah bersaing. Kapankah.....??? (guslim, mei 2010)

Kaji Pembentukan Perusahaan Pengelola APBS

SURABAYA (Wartagafeksi): PT Pelabuhan Indonesia III berupaya menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membentuk perusahaan patungan guna mengelola alur pelayaran barat Surabaya



Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta tim ekonomi Pemprov provinsi tersebut untuk melakukan kajian mendalam terkait tawaran PT Pelabuhan Indonesia III dalam membuat perusahaan patungan dalam mengelola alur pelayaran Surabaya barat (APBS).

“Tawaran Pelindo III itu akan dikaji, tim ekonomi akan mendalami lebih detail prospeknya terkait pembentukan perusahaan pengelola APBS itu,” kata Soekarwo kepada wartagafeksi, belum lama ini.

Sebelumnya Pelindo III mengharapkan adanya kerjasama bisnis dengan Pemprov Jatim dalam mengelola APBS melalui pembentukan perusahaan bersama.

Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo III Faris Assegaf mengakui pihaknya telah menawarkan rencana pembentukan BUMN dengan Pemprov Jatim yang dikhususkan dalam mengelola alur pelayaran itu.

“Pembentukan perusahaan itu menjadi penting mengingat keberadaan alur pelayaran di Selat Madura itu kedepan sangatlah prospektif bila melihat sisi strategisnya. Kini prosesnya dalam tahap dibicarakan dengan Pemprov Jatim, karena perusahaan itu akan nantinya jadi BUMD bagi intitusi daerah itu,” kata Faris kepada wartagafeksi, belum lama ini.



Dia menerangkan ada beberapa proyek pengembangan pelabuhan jangka panjang yang masih berada di alur itu sehingga pengelolaan alur menjadi sangat penting pada sisi bisnis.

“Sebut saja ada rencana pengembangan pelabuhan dengan fasilitas terminal multifungsi di Teluk Lamong. Proyek Lamong Bay merupakan rencana untuk mengantisipasi kejenuhan di Pelabuhan Tg. Perak Surabaya dan kini tengah memasuki tahap tender dan diharapkan pada 2012 bisa beroperasi.”

Faris menerangkan langkah mendirikan perusahaan patungan dengan Pemprov Jatim itu sebenarnya diilhami keberhasilan pendirian PT Ambang Barito Nusapersada yang didirikan dengan Pemprov Kalimantan Selatan pada 2008 lalu. Perusahaan itu kini telah beroperasi untuk mengelola alur sungai Barito,” ujarnya.

Rencana pembentukan perusahaan patungan pengelola alur pelayaran di Selat Madura itu sebenarnya telah disampaikan manajemen PT Pelindo III kepada Menteri BUMN Mutafa Abubakar saat berkunjung ke anak perusahaan PT Pelindo III yaitu PT Terminal Petikemas Surabaya, belum lama ini.

“Manajemen kini tengah menggagas proses pembentukan perusahaan patungan itu, semoga saja bisa segera terealisasi,” kata Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, belum lama ini.

Terkendala Pipa Gas

Secara khusus Gubernur Jatim menegaskan bila rencana pembentukan perusahaan patungan itu masih mengalami sejumlah kendala terkait kondisi APBS yang belum sepenuhnya terbebas dari hambatan adanya pipa gas bawah laut milik operator gas Kodeco.

“Hambatan paling utama terkait adanya pipa gas Kodeco yang mesti diperdalam dari ditanam 3 meter menjadi 16 meter dibawah permukaan laut. Proses penanaman itu kini belum tuntas semuanya. Ini yang menjadi catatan untuk meneruskan proyek perusahaan patungan itu,” ungkapnya.

Desak Revitalisasi APBS

PT Terminal Petikemas Surabaya berharap kepada pemerintah agar alur pelayaran barat Surabaya dapat diperlebar maupun diperdalam sehingga keberadaannya akan dapat dilalu oleh kapal petikemas generasi terbaru dan dapat menaikkan pertumbuhan volume petikemas yang kini hanya berkisar 3% per tahun.

Direktur Utama PT TPS Mohammad Zaini mengakui bila pertumbuhan operator terminal petikemas anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III itu pertahunnya hanya berkisar 3%.

“Pertumbuhan volume petikemas di TPS per tahunnya tidak besar hanya 3%, kondisi ini sebenarnya masih bisa dipacu bila APBS dapat diperlebar dan diperdalam sehingga lalu lintas kapal lebih lancar. Pelebaran dan pendalaman itu dipastikan akan merangsang kapal container skala besar masuk Tanjung Perak,” kata Zaini disela-sela syukuran HUT PT TPS ke-11, belum lama ini.

Zaini mengakui pelebaran dan pendalaman alur memang menjadi vital bila ingin pertumbuhan arus barang maupun petikemas ke Tanjung Perak meningkat tajam.

“Pada konteks pelayanan, TPS selalu berbenah. Tahun ini akan ada pembenahan terminal operating system serta penambahan headtruck sebanyak lima unit. Optimalisasi layanan juga dilakukan dengan diraihnya sertifikat ISO 28000:2007 tentang security management system for the supply chain yang dikeluarkan oleh auditor Jepang, TUV heinland,” ujarnya.

Sebelumnya sejumlah kalangan telah mengeluhkan persoalan APBS baik lebarnya yang kini hanya 100 meter dan kedalamannya yang terbatas 9,5 -10,5 meter. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan pipa gas milik operator Kodeco yang dipasang melintang alur.

Keluhan itu setidaknya pernah dilontarkan kalangan pelaku usaha di Tanjung Perak termasuk Kadin Jatim dan PT Pelindo III Bahkan, tak urung Gubernur Jatim Soekarwo sendiri secara khusus menyoroti persoalan alur termasuk keberadaan pipa gas Kodeco, karena fasilitas itu dinilai akan menghambat proses pelebaran maupun pendalaman alur.

“Terus terang persoalan pipa gas milik Kodeco itu sangat mengganggu, kini Pemprov masih menunggu upaya pendalaman pipa hingga 16 meter di bawah permukaan,” ujar Soekarwo kepada pers, awal pekan ini.

Karena persoalan pipa gas di APBS itu, Soekarwo terpaksa menunda keterlibatan Pemprov Jatim untuk mendirikan perusahaan patungan dengan PT pelindo III dalam mengelola alur tersebut.

Raih ISO 28000:2007

PT Terminal Petikemas Surabaya berhasil meraih sertifikat ISO 28000:2007 tentang standar sistem manajemen keamanan untuk rantai distribusi yang menjadikannya yang pertama dimiliki fasilitas petikemas di Indonesia .

Direktur Utama PT TPS Mohmamad Zaini menegaskan raihan ISO 28000:2007 ini menjadi kado istimewa bagi perayaan ulang tahun anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia III itu yang kini mencapai usia 11 tahun.

“Alhamdulillah, TPS telah ditetapkan meraih ISO 28000:2007 tentang security management system for the supply chain yang dikeluarkan oleh auditor Jepang, TUV heinland sejak akhir 2009. Namun secara resmi sertifikatnya baru diserahkan terimakan pada awal Februari 2010,” kata Zaini disela-sela syukuran HUT ke-11 TPS di Surabaya, belum lama ini.

Penghargaan ISO tersebut, lanjut dia, menjadikan TPS sebagai operator terminal petikemas pertama di Indonesia yang meraih sertifikat itu.

“Sertifikat ini [ISO 28000:2007] menjadi sangat membanggakan bagi manajemen. Ini merupakan sertifikat ISO ke-5, setelah sebelumnya telah meraih ISO 9001 [standar mutu], ISO 14001 [standar lingkungan], OHSAS 18001 [standar kesehatan dan keselamatan kerja] serta ISPS Code [standar keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan],” ujarnya.

Zaini menegaskan hingga kini rata-rata pertumbuhan arus petikemas di TPS berkisar 3% setiap tahun, manajemen berharap kedepan akan ada peningkatan yang signifikan dengan adanya program pengembangan fasilitas serta upaya pengelolaan alur melalui pendalaman dan pelebaran.

Pada triwulan I/2010 ini, kata dia, volume petikemas mencapai 301.146 twenty foot equivalent units (TEUs). Sedangkan raihan triwulan I/2008 mencapai 290.104 TEUs dan pada periode sama tahun lalu 239.407 TEUs.

“Bila dibandingkan dengan periode sama 2008, maka volume petikemas TPS mengalami peningkatan sebesar 4%. Namun bila dibandingkan volume tahun ini dengan 2009 ada peningkatan 7%.”

Zaini menambahkan untuk rata-rata volume petikemas yang dihandling TPS per bulan untuk triwulan I/2010 mencapai 100.000 TEUs, sedangkan pada 2008 mencapai rata-rata 96.000 TEUs per bulan. Khusus 2009, mencapai rata-rata 93.000 TEUs per bulan. (wartagafeksi/hd)

CAFTA PERLU DICERMATI



Oleh : Iwan Sabatini

Terkait dengan pelaksanaan ACFTA (Asia – China Free Trade Area) khususnya di lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero), maka berdasarkan pengamatan arus barang impor / ekspor pada beberapa pelabuhan utama seperti Tg. Perak – Surabaya , PT. TPS – Surabaya, dan TPKS-Semarang dapat disimpulkan tidak terdapat lonjakan peningkatan arus import dan ekport ke/dari China, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Untuk General Cargo

	Handling	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Cabang Pelb Tg Perak	372.185 Ton/m3	377.768 Ton/M3

dan perkiraan tahun 2010 sebesar 383.434 Ton/M3 atau secara rata-rata selama 3 tahun (2008 – 2010) sebesar **7,08%** dari total arus GC melalui Pelabuhan Tg. Perak. Dengan kata lain dalam 3 tahun terakhir tidak terdapat lonjakan arus barang dari China.

b. Untuk Curah Cair.

	Handling	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Cabang Pelb Tg Perak	70.822 Ton/m3	73.683 Ton/M3

dan taksasi tahun 2010 sebesar 73.683 Ton/M3 (atau naik menjadi 4,68%). Arus CC mengalami hanya sebesar **1,63%** dari tahun sebelumnya, Hingga akhir tahun 2010 diperkirakan arus barang akan relatif stabil dan tidak ada indikasi peningkatan; Curah cair ini kebanyakan berupa bahan-bahan kimia untuk melayani industri khusus, sehingga sangat tergantung dari kapasitas terpasang industri tersebut (seperti sorbitol dll) ;

c. Untuk Curah Kering.

	Handling	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Cabang Pelb Tg Perak	412.225 Ton/m3	420.470 Ton/M3

dan taksasi tahun 2010 diperhitungkan sebesar 428.879 Ton/M3. Atau rata-rata sebesar **6,58%** dari total arus CK yang melalui Pelabuhan Tg. Perak.

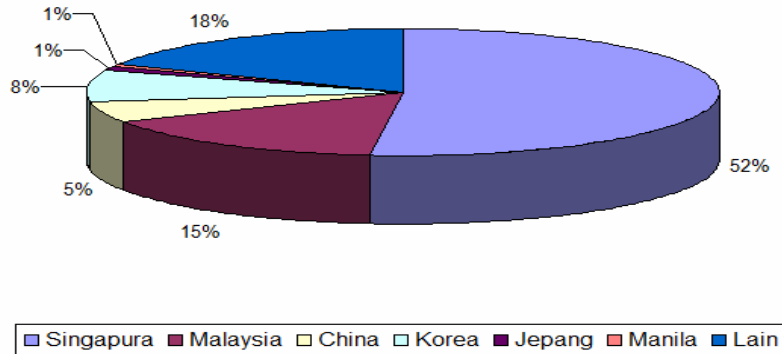
c. Untuk Petikemas.

Arus petikemas dari pelabuhan Tg Perak tercatat export import ke pelabuhan pelabuhan seperti ke Singapore sebagai Feeder mencapai 568.270 Teus, Malaysia (Port Tg Pelepas 119.235 Teus & Port Klang 49.954 Teus), China 7 pelabuhan 62.705 Teus), Korea (Koshung 40397 Teus, Pusan 27.471 Teus, Taichung 21.021 Teus) Jepang 10.486 Teus, Manila 6.999 Teus, dan ke negara lain 195.079 Teus, dengan Demikian dari total handling di Tg Perak (Internasional) sebesar 1.119.920 Teus, arus dari dan ke China sekitar 5%. Disamping itu TPKS Semarang juga menghanding petikemas dari dan ke China sebanyak 3.515 Teus

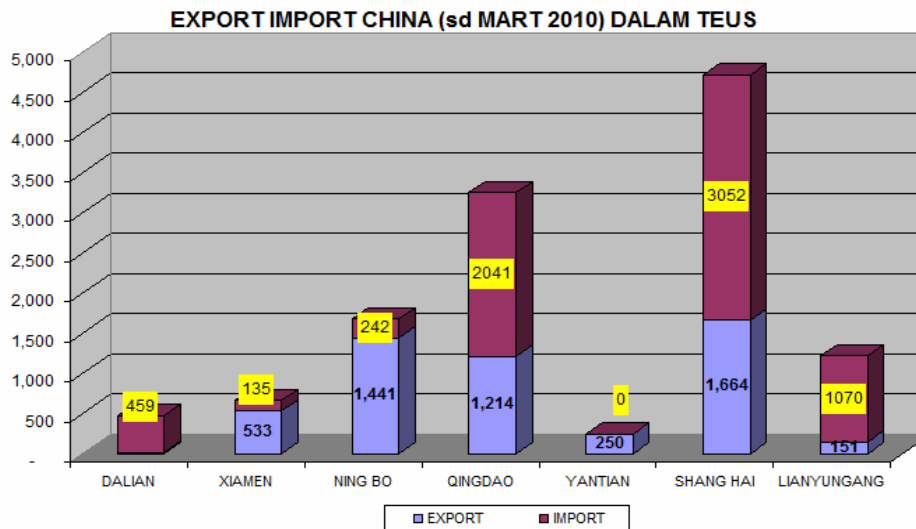
	Handling (expor impor)	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Tg Perak (TPS)	58.537 Teus	62.705 Teus

2.	TPKS Semarang	2.455 Teus	3.515 Teus
	Total	60.992 Teus	66.210 Teus

ARUS PETIKEMAS EXPOR & IMPOR



Menurut Iwan Sabatini, Kahumas Pelindo III bahwa untuk arus petikemas dari Tg Perak khusus yang ke China ada 7 Pelabuhan (seperti pada tabel) dan sejak Januari s/d Maret 2010 tercatat total Expor dari Indonesia sebanyak 5.274 Teus (42,92%) dan Import barang dari China sebanyak 6.999 Teus (57,08%) atau Total 12.293 Teus dalam Triwulan I tahun 2010 ini, melihat hal ini tampak trend masih relatif sama. Hanya menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, agar tetap berupaya meningkatkan produk dalam negeri yang bisa diexport ke China dan negara lain.



Disamping itu untuk kegiatan eksport ke China tahun 2008 di TPKS Semarang tercapai sebesar 2,455 Teus dari 115.382 atau 2,1% dari total ekspor. Tahun 2009 ekspor tercapai sebesar 3.515 Teus dari 106.360 Teus atau menjadi 3,3% total ekspor. Tahun 2010 (3 bulan Jan – Mar 2010) tercapai sebesar 1.132 Teus dari 28.902 Teus atau naik menjadi 3,9% atau secara rata-rata selama 3 tahun ekspor ke China hanya sebesar 2,8% dari total kegiatan ekspor. Untuk kegiatan impor dari China, tahun 2008 tercapai 1.343 Teus dari total impor sebesar 85.185 Teus atau 1,6% dari kegiatan impor total. Tahun 2009 tercapai 2.680 Teus dari 116.664 Teus menjadi sebesar 3,5%. Di tahun 2010 (3 bulan

terhitung bulan Januari) 487 Box dari 20.261 Teus atau turun menjadi 2,4% atau secara rata-rata impor dari China dalam 3 tahun adalah sebesar 2,5%.

EXPORT	IMPORT DARI CHINA
BARANG PROYEK	ALAT-ALAT PROYEK
BATUBARA	ALUMINIUM BICARBONAT
BUNGKIL KOPRA	BAHAN KIMIA (TIDAK BERBAHAYA)
GAPLEK	BELERANG
MINYAK NABATI	BATU KALI, BATU KERIKIL
MINYAK SAWIT	BESI BETON & BESI SIKU
PASIR BESI	BESI TUA/SCRAP IRON
SOYABEAN MEAL	FOODER DALAM KARUNG DAN SEJENISNYA
STEEL PLATES	GANDUM & GULA PASIR
TAPIOCA CHIP	IRON BEAMS
	JAGUNG & KOPRA & TAPIOKA
	MOBIL & TRUCK MESIN BERMOTOR
	MESIN STENSIL DAN MESIN-MESIN LAINNYA
	MESIN-MESIN PERKAKAS DAN ONDERDILNYA
	PHOSPATE ROCK
	PHENOL LIQUID
	PHOSPORIC ACID
	PIPA PVC (PARALON)
	PIPE AND TUBES
	SHEET IRON IN COILS
	SODA ASH & SODIUM
	SOYABEAN MEAL
	STEEL BILLETS & STEEL BLOOMS
	STEEL PLATES & STRIPS IRON/ STEEL

Sumber : Humas Pelindo III

Menurut Iwan Sabatini, Kahumas Pelindo III bahwa secara umum dapat digambarkan bahwa pada pelabuhan utama di lingkungan PT. Pelindo III (Persero) belum menampakan hal-hal yang dapat ditengarai sebagai dampak China – AFTA, mengingat posisi relatif eksport/impor ke/dari China hanya berkisar antara 1,63% sd. 7% saja, sedangkan untuk orang/ penumpang kapal laut, tidak terdapat indikasi mobilitas yang menonjol arus penumpang luar negeri utamanya dari China, mengingat terminal penumpang lebih dari 95% melayani penumpang antar pulau dalam negeri/ domestik.

(Humas.Pelindo III)

Konsultasi Pajak :

Ekspor JKP : Berlaku Untuk Semua Jasa

Pada artikel yang dimuat di edisi Januari 2010, tersisa pertanyaan sebagai berikut, "Apakah atas ekspor JKP juga diperlukan dokumen Pemberitahuan Ekspor, seperti halnya yang selama ini berlaku atas ekspor barang berwujud?" Pertanyaan ini timbul karena pada saat artikel itu dibuat, belum terbit peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai PPN.

Pada saat itu, terdapat 2 (dua) pendapat. Sebagian di antaranya mengatakan tidak perlu Pemberitahuan Ekspor. Pasalnya berdasarkan kelaziman yang selama ini terjadi pada praktik kepabeanan, Pemberitahuan Ekspor hanya diperlukan untuk ekspor barang berwujud. Sebagiannya lagi berpendapat sebaliknya, yaitu sangat memerlukan Pemberitahuan Ekspor sebagai bukti telah dilakukannya ekspor JKP.

Kini dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2010 tertanggal 31 Maret 2010 jelas sudah bahwa, atas ekspor jasa pun diperlukan Pemberitahuan Ekspor, tepatnya Pemberitahuan Ekspor JKP, sebagai bukti pelaksanaan ekspor JKP. Bedanya dari Pemberitahuan Ekspor Barang, Pemberitahuan Ekspor JKP dibuat sendiri oleh PKP yang melakukan ekspor JKP dengan menggunakan formulir sesuai lampiran peraturan Menkeu ini. Sedangkan Pemberitahuan Ekspor Barang dibuat oleh aparat Ditjen Bea dan Cukai yang melegalisir transaksi ekspor.

Pertanyaannya, kapan Pemberitahuan Ekspor JKP tersebut wajib dibuat, sebab JKP tidak kasat mata seperti BKP? Peraturan Menkeu di atas mengatur bahwa Pemberitahuan Ekspor JKP ini wajib dibuat pada saat ekspor JKP, yaitu saat penggantian atas jasa yang dieskpor tersebut dicatat atau diakui sebagai penghasilan. Peraturan Menkeu ini juga menetapkan bahwa Pemberitahuan Ekspor JKP yang telah dibuat dan dilampiri dengan invoice yang tidak terpisahkan dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak seluruh penyerahan JKP ke luar negeri (baca: luar Daerah Pabean, red) dapat dianggap sebagai ekspor JKP yang dikenakan PPN sebesar 0%.

Sebagaimana telah digariskan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2010, jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN sebesar 0% terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu jasa maklon dan selain jasa maklon. Jasa maklon yang dimaksud harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemesan atau penerima JKP berada di luar Daerah Pabean dan merupakan WPLN (Wajib Pajak Luar Negeri) dan tidak mempunyai BUT (Bentuk Usaha Tetap) sebagaimana dimaksud dalam UU PPh;
2. Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP;
3. Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan;
4. Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP; dan Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar Daerah Pabean.

Sementara untuk selain jasa maklon, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Melekat pada atau untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean. Contoh yang paling tepat dari kategori ini adalah jasa perbaikan dan perawatan barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean;
2. Melekat pada atau untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean. Contohnya adalah jasa konstruksi, baik layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa klausul 'ekspor JKP' pada prinsipnya tidak dapat diterapkan untuk semua jasa. Ekspor JKP yang dikenakan PPN sebesar 0% ini hanya dapat berlaku untuk jasa yang berkaitan dengan 'barang', tepatnya barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dan/atau barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean. Sehingga tatkala telah menyerahkan JKP ke pihak yang berdomisili di luar negeri, PKP yang bersangkutan harus mencermati terlebih dahulu apakah JKP yang diserahkan ke luar negeri tersebut berkaitan dengan barang atau tidak?

Jika jawabnya adalah ya, cermati lebih jauh apakah barang itu merupakan barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dan/atau barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean atau bukan? Jika jawabnya adalah 'tidak', maka atas transaksi itu tidak dapat dikategorikan sebagai ekspor JKP, sehingga tarif PPN sebesar 0% tidak dapat diterapkan.

Contohnya saja jika suatu PKP menyerahkan jasa konsultasi hukum kepada pihak yang berlokasi di luar negeri, apakah transaksi ini dapat dikategorikan sebagai ekspor JKP sehingga dikenakan PPN sebesar 0%? Jasa konsultasi hukum tidak dapat dikatakan berkaitan dengan barang, baik barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean dan/atau barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean. Oleh karena itu, atas transaksi ini tidak dapat disebut sebagai ekspor JKP, sehingga tarif PPN sebesar 0% tidak dapat diterapkan. Namun apakah transaksi ini lantas tidak terutang PPN sama sekali? Atau, justru dianggap sebagai penyerahan lokal yang terutang PPN sebesar 0%.

Dengan mengacu pada Pasal 4 UU PPN yang menganut destination principle, sebagian pihak berpendapat bahwa atas penyerahan jasa konsultasi hukum ke luar negeri ini tetap terutang PPN sebesar 10%, seperti halnya transaksi lokal. Sementara sebagiannya lagi berpendapat sebaliknya. Pendapat kedua ini berdasarkan pertimbangan bahwa jasa tersebut dikonsumsi di luar daerah pabean. Namun untuk menghindari resiko, akan lebih baik bila PKP yang menyerahkan JKP tetap mengenakan PPN sebesar 10% dari Penggantian.

Garuda Buka Rute Hongkong-Surabaya, Malaysia Airlines Alami Kenaikan Load Factor

SURABAYA(wartagafeksi) : Sejumlah operator penerbangan semakin gencar melakukan penetrasi pasar khususnya untuk rute ke luar negeri dari Surabaya, kondisi ini disebabkan potensi market yang sangat besar menyusul adanya peningkatan load factor yang diindikasikan dengan semakin membaiknya perekonomian dunia.



Setidaknya dua operator penerbangan yang getol itu adalah PT Garuda Indonesia dan Malaysia Airlines.

PT Garuda Indonesia berencana akan membuka kembali rute penerbangan Surabaya-Hongkong-Surabaya pada 1 Juni 2010 dengan target load factor 80% sehingga pada akhir tahun ini bisa meraih sedikitnya 8.500 penumpang untuk rute tersebut.

Senior General Manager Ares Eastern Indonesia Garuda Indonesia, Suranto menegaskan rute Surabaya-Hongkong sebenarnya sempat dilayani pada tahun lalu, namun belum sempat berjalan satu tahun ditutup sementara.

"Rute itu [Surabaya-Hongkong] sempat diterbangi armada Garuda pada periode Februari-November 2009. Namun akibat utilitas pesawat dinilai lebih menguntungkan digunakan untuk rute lain maka rute itu ditutup sementara. Kini rute itu akan kembali dibuka pada 1 Juni 2010 menyusul adanya tambahan armada baru," ungkap Suranto kepada pers, belum lama ini.

Suranto menegaskan rute penerbangan Surabaya-Hongkong itu merupakan rute penerbangan luar negeri ke-23 yang dilayani oleh manajemen.

Business Development Manager Area Eastern Indonesia Ismu Gito Waluyo mengungkapkan manajemen mematok target isian rute Surabaya-Hongkong sebesar 80%, karena pada tahun lalu volume isian tersebut mampu dicapai. Rute itu akan dilayani seminggu sebanyak tiga kali, yaitu Selasa, Kamis dan Minggu.

"Rute baru itu akan menggunakan armada baru jenis Boeing 737-800 Next Generation berkapasitas 156 seat, diharapkan raihan load factornya sama dengan tahun lalu berkisar 80%. Bila tercapai maka akhir tahun ini volume penumpang pada rute itu bisa mencapai 8.500-8.600 orang," kata Ismu kepada pers, belum lama ini.

Untuk harga tiket, kata Ismu, khusus edisi promo pada penerbangan awal dipatok US\$350 per penumpang.

Dia menerangkan komposisi segmen penumpang yang ditargetkan diharapkan pada tahun pertama dapat dipasok dari 30% kalangan pebisnis, 25% wisatawan dan 45% akan disumbang oleh tenaga kerja Indonesia.

Data yang dihimpun wartagafeksi, operator penerbangan BUMN yang akan segera melakukan initial public offering (IPO) itu pada tahun ini akan mendatangkan 24 unit pesawat baru secara bertahap.

Alokasi saham yang di-IPO-kan mencapai 40% dengan target dapat menghimpun dana US\$300 juta.

Kekuatan armada baru itu diharapkan dapat mendukung layanan penerbangan yang kini berjumlah 54 rute yang terbagi 32 rute domestic dan sisanya 22 unit merupakan rute penerbangan luar negeri.

MAS Alami Kenaikan Load Factor

Maskapai Malaysia Airlines pada triwulan I/2010 mencatatkan rata-rata load factor untuk rute penerbangan Surabaya-Kuala Lumpur yang dilayani setiap hari mencapai 75%, tingkat isian itu meningkat hingga 150% lebih dibandingkan capaian periode sama 2009 yang hanya berkisar 30%.

District Manager Surabaya Malaysia Airlines Suzanna Shamsuddin mengakui adanya peningkatan tingkat isian penumpang pada rute Surabaya-Kuala Lumpur.

“ Ada peningkatan load factor rute tersebut [Surabaya-Kuala Lumpur] hingga 150%, bayangkan saja pada triwulan I/2009 hanya mencapai 30%. Kini load factor itu mencapai 75%-80%. Ini menggembirakan karena krisis global menunjukkan proses recovery yang berhasil,” kata Suzanna kepada pers disela-sela Malaysia Airlines Holiday Packages Fair, belum lama ini.

Namun Suzanna enggan menyebut pasti detail jumlah penumpang yang mengalami peningkatan itu.

Dia menerangkan potensi pasar penerbangan di Surabaya untuk rute global (luar negeri) masih terbuka lebar. Karena Kota ini merupakan satu dari lima base yang ada di Indonesia , selain Jakarta , Medan , Yogyakarta dan Denpasar.

“Manajemen masih cukup optimis dengan raihan penumpang dari Surabaya , upaya itu dilakukan dengan semakin gencar melakukan edukasi pasar melalui sejumlah program dengan melibatkan sejumlah biro perjalanan,” ujarnya.

Untuk program Malaysia Airlines Holiday Packages Fair, lanjut dia, ini diikuti 18 travel agent dan digelar di Tunjungan Plaza dan Pakuwon Supermall.

Suzanna optimis beban target yang dibebankan agar ada peningkatan signifikan dari jumlah isian di Surabaya .

“Target insyaAllah akan bisa dipenuhi, apalagi armada Malaysia Airlines kini berjumlah 80 unit yang terdiri dari sejumlah varian baru baik versi Airbus maupun Boeing. Ini akan menjadi keunggulan layanan bagi manajemen,” ujarnya.

Kebijakan Double Tax Dikeluhkan Pengusaha di Jatim dan Ekspor MAMIN Naik 10%

SURABAYA (wartagafeksi): Sejumlah pelaku usaha di Jawa Timur mengeluhkan kebijakan pajak yang dinilai membebani khususnya terkait adanya double tax terhadap sejumlah sektor usaha sehingga dinilai menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta mempengaruhi daya saing produk nasional.



Keluhan itu disampaikan oleh kalangan pengusaha kepada Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Jatim.

Disisi lain, kinerja ekspor makanan dan minuman di Jatim pada triwulan I/2010 mengalami peningkatan 10%. Kenaikan itu dikarenakan sejak mulai diberlakukannya kesepakatan kerjasama perdagangan Asean Cina (ACFTA) pajak bea masuk dan keluar mamin hingga 0%.

Ketua Kadin Surabaya, Jamhadi menegaskan dunia usaha sering diberatkan dengan adanya kebijakan fiskal khususnya sektor perpajakan yang dibebankan dua kali.

“Misalnya, pengusaha telah dikenakan pajak penghasilan (PPn) 10%, namun dalam sistem tax refund pengusaha kerap dikenakan pajak untuk proyek yang sebelumnya telah terkena pajak. Sehingga pengusaha terkena pajak dua kali pada objek pajak yang sama. Ini jelas memberatkan,” kata Jamhadi kepada pers se usai hearing dengan Panja Perpajakan Komisi XI DPR RI, belum lama ini.

Jamhadi mengungkapkan kebijakan itu akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

“Kebijakan perpajakan ini menjadi ekonomi biaya tinggi, sehingga produk nasional akan kalah bersaing,” tegasnya.

Ketua Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Jatim, Judy Purwoko menyesalkan kebijakan perpajakan itu yang juga dikeluhkan kalangan dunia importir.

“Pungutan pajak untuk importir sejauh ini juga masih terbilang tinggi. Meski Asean China Free Trade Area [ACFTA] telah ditetapkan sejak Januari 2010, namun hingga kini importir tetap dibebankan biaya pajak yang cukup tinggi, khususnya di pelabuhan,” kata Judy pada kesempatan sama.

Dia menjelaskan dalam aturannya Bea Masuk (BM) impor kadang telah diputuskan 0%, namun pihak perpajakan seolah-olah memindahkan kewajiban pajak sebagai non tariff barrier (NTB).

Sementara itu, terkait maraknya kasus markus perpajakan yang terjadi akhir-akhir ini, Ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan sanksi administrasi dan juga sanksi pidana kepada pelaku penggelapan pajak.

Ekspor Mamin naik 10%

Pada triwulan pertama 2010, ekspor produk-produk makanan dan minuman (Mamin) Jatim naik sekitar 10 persen. Kenaikan itu dikarenakan sejak mulai diberlakukannya kesepakatan kerjasama perdagangan Asean Cina (ACFTA) pajak bea masuk dan keluar mamin 0%.

Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi) Jawa Timur, Yapto Willy Sinatra mengatakan, produk mamin Jatim kini telah diekspor dan menembus pasar negara-negara Asia khususnya ASEAN dan Cina, juga ke Eropa serta Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir, dan Yaman.

Dia menambahkan jenis produk mamin yang paling banyak untuk konsumsi ekspor adalah roti mari, jelly, makanan ringan seperti kacang, keripik dan minuman buah dari anggur, apel, jambu, jeruk dan stroberi serta lainnya.

"Diberlakukannya ACFTA, belum berpengaruh terhadap produk-produk lokal, ini terbukti ekspor mamin meningkat meskipun persentasenya kecil," kata Yapto belum lama ini.

Agar produk mamin berkembang baik, lanjut dia, diharapkan pemerintah memperketat pengawasan terhadap komoditi impor mamin khususnya produk dari Cina yang masuk secara ilegal ke Jatim.

"Kerena jika dibiarkan masuknya produk impor mamin dari Cina ke Jatim secara tidak langsung akan menghambat, bahkan mematikan industri mamin di Jatim. Seperti dicontohkan, Selasa 27 April 2010 Pemprov Jatim memusnahkan barang-barang komoditi impor ilegal di Juanda Sidoarjo. Ini bukti nyata Pemerintah Provinsi Jatim tidak ada toleransi terhadap barang-barang impor yang masuk secara ilegal."

Dia menegaskan Gappmi masih mengeluhkan rusaknya jalan raya Porong Sidoarjo yang dampaknya sangat mengganggu transportasi pengiriman mamin dari Malang, Jember, Probolinggo dan sekitarnya ke Surabaya.

"Akibatnya, biaya pengiriman yang biasanya Rp1 juta untuk satu kali jalan meningkat menjadi Rp1,2 juta atau membengkak 20%."

Menurut data dari Gappmi Jatim pada 2009, ada sekitar 650 produsen mamin. Dari jumlah 650 produsen mamin, 10-15 produsen mamin berskala besar dan sisanya merupakan pengusaha berskala menengah dan kecil.



Gappmi berharap sekitar 650 produsen mamin yang ada di berbagai daerah di Jawa Timur minimal mempertahankan dan terus berusaha meningkatkan kualitas hasil produksinya. Dengan kualitas dan kemasan yang baik maka bisa meningkatkan daya saing produk-produk mamin lokal dengan produk mamin impor.

Kepala Bidang Perdagangan Internasional Disperindag Jatim, Saiful Jasan mengatakan, ACFTA sebenarnya diberlakukan secara bertahap sejak 2002.

Sebelum diberlakukan kesepakatan, kata dia, pemerintah Indonesia khususnya Jatim sudah melakukan kerjasama kesepakatan menurunkan tarif bea masuk sampai nol persen perdagangan antara Indonesia dan Cina.

Sebelum diberlakukan kesepakatan, kata dia, pemerintah Indonesia khususnya Jatim sudah melakukan kerjasama kesepakatan menurunkan tarif bea masuk sampai nol persen perdagangan antara Indonesia dan Cina.

"Barang-barang yang bea masuknya turun hingga nol persen secara bertahap adalah komoditi hasil pertanian dan kehutanan, seperti buah-buahan, sayuran. Kemudian menyusul produk-produk makanan dan minuman yang bea masuknya sampai nol persen," tegasnya.

Dengan diperlakukan tarif bea masuk menjadi nol persen, menurut dia, peluang pasar untuk komoditi pertanian cukup besar di kedua negara. Perlu diketahui, peluang pasar cukup besar khusus produk pertanian dikarenakan penduduk di kedua negara cukup besar. (wartagafeksi/hd)

Selain itu, Nyalla juga berharap pemerintah akan menggunakan hasil pungutan pajak yang dihasilkan tersebut untuk kepentingan masyarakat.

"Tujuan pungutan pajak yang dilakukan tidak hanya untuk memperbesar pendapatan pemerintah saja namun juga untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif," ungkap Nyalla.

Hadir dalam rapat kerja tersebut Panitia Kerja (Panja) Perpajakan Komisi XI DPR RI, diantaranya Ketua Komisi XI DPR RI Mustafa Kamal, Ketua Panja Perpajakan DPR RI, Melchias Markus Mekeng beserta anggotanya.

GAFEKSI PKH Juanda Outbond

Pada tanggal 24 April 2010 yang lalu GAFEKSI Perwakilan Khusus Juanda melaksanakan salah satu program kerjanya yaitu Outbond . Acara ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan kerja antara sesama anggota disamping memberikan penyegaran dari kegiatan rutin sehari hari.

Outbond kali ini diikuti oleh 100 peserta dan lokasi yang di pilih adalah di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Baung yang terletak di Desa Cowek, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan , JATIM. Kawasan outbond ini seluas 195,5 Hektar dan berdampingan dengan Kebun Raya Purwodadi. Adapun tema outbond adalah BREAKFAST : Break Fearness, Arrogancy, Selfish, Talk more. Mengajak para peserta untuk mengatasi kesulitan dalam keadaan apapun, tidak takut dalam mengambil keputusan, tidak arogan dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, bertindak dengan baik dan benar. Peserta dilatih tentang kepemimpinan dan leadership.

Semua ini diwujudkan dalam permainan : Traffic jam, puzzle, estafet hula hop, flying fox, mendayung rakit namun kegiatan tracking banyak membuat peserta merasa capek.

Pengurus tidak ingin perusahaan anggota yang ikut outbond terbebani, untuk itu acara ini disubsidi 50% oleh Gafeksi PKH. Juanda . Berangkat bersama dari Juanda dengan menggunakan bis Pariwisata, Peserta mendapatkan Kaos, 3 x makan, 2 x coffee break dan aneka doorprize : 2 tiket Surabaya Denpasar PP dari Garuda Indonesia, 2 tiket Surabaya Makassar PP dari Sriwijaya, 2 tiket Surabaya Jakarta PP dari PT Avia Cargo, Handphone dari Royal Brunei, peralatan masak dari PT. Orisindo dan masih banyak doorprize yang disediakan oleh Panitia. (ima)



Dialog Anggota GAFEKSI



Forum Dialog Anggota adalah forum yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan anggota. Karena melalui forum inilah anggota akan dipertemukan dalam satu forum dengan para pihak pemegang otoritas yang terkait dengan kegiatan usahanya sehari-hari. Mulai dari pihak bea cukai, pengelola pelabuhan, karantina maupun pihak lainnya dalam mata rantai usaha kepelabuhanan.

Hari Rabu, 21 April 2010, di Convention Hall Gramedia Expo, Dialog Anggota dibuka dengan sambutan Ketua DPW GAFEKSI Jawa Timur, Azis Winanda. Perusahaan anggota yang hadir lebih dari 150 perusahaan, sedangkan para nara sumber hadir dari pihak Kepala Pelayanan Bea Cukai Tg. Perak, PT. Terminal Petikemas Surabaya, Balai Karantina dan Balai POM.

"Dialog Anggota ini agenda rutin tahunan, diharapkan melalui forum ini perusahaan anggota dapat menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Demikian pula dari pihak pemegang otoritas mendapatkan informasi langsung dari para pelaku usaha, khususnya hal-hal yang perlu dilakukan pembenahan dalam proses layanan yang diberikan." demikian uraian Azis Winanda dalam sambutan pembukaannya.

Perusahaan anggota dengan penuh antusias menyampaikan uneg-unegnya kepada para nara sumber yang diundang. Dengan berbagai ragam gaya bahasa dan gaya penyampaian, mereka mengutarakan berbagai kendala yang sering muncul, sering disampaikan sebagai keluhan klasik tapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Seperti masalah warkat dana di TPS yang nota rampungnya relatif lama dibanding dengan BJTI (PT Berlian Jasa Terminal Indonesia). Ada yang lebih agitatif menanyakan tentang prosedur agen lossing pada pihak bea cukai, agar lebih sederhana dan lebih cepat proses pengurusan dokumen pabeannya.

Semuanya mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan bagi pihak perusahaan anggota yang memiliki kendala teknis. Namun dari pengalaman yang lalu, penyelesaian di forum Dialog Anggota kadang belum bahkan tidak dilaksanakan ditingkat pejabat teknis di lapangan.

Belum berselang satu bulan dari pelaksanaan Dialog Anggota, sudah ada perusahaan anggota yang menanyakan perbedaan berkas yang dipersyaratkan oleh bea cukai dalam hal agent lossing. Yaitu surat rekomendasi dari pihak pengelola tempat barang impor dibongkar, kalau di BJTI hanya cukup mengeluarkan satu surat untuk semua aktivitas bongkar barang impor di BJTI, sedangkan di dermaga Jamrud yang dikelola PT Pelindo III Tg. Perak surat rekomendasi dikeluarkan hanya untuk satu aktivitas bongkar saja.

Tuntutan anggota, GAFEKSI dimohon untuk membantu dalam mengkomunikasikannya dengan pihak bea cukai dan PT Pelindo III Tg. Perak. Inilah tugas GAFEKSI sebagai konsekwensi logis dalam memberikan layanan pada anggotanya. (guslim, mei 2010)